



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SEKRETARIAT DAERAH



RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

TAHUN 2024



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024 perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2024;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan :

- a. mewujudkan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
- b. tercapainya pemanfaatan potensi Perangkat Daerah Kota Pontianak secara maksimal, efisien dan efektif;
- c. menjadi kerangka acuan bagi Kepala Perangkat Daerah Kota Pontianak dan perangkatnya dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD; dan
- d. sebagai instrumen penilaian kinerja Perangkat Daerah Kota Pontianak, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas.

BAB III RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 memuat program, kegiatan, Sub kegiatan dan pagu Indikatif.
- (3) Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024.
- (4) Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak menjadi pedoman dalam menyusun RKA.

Pasal 6

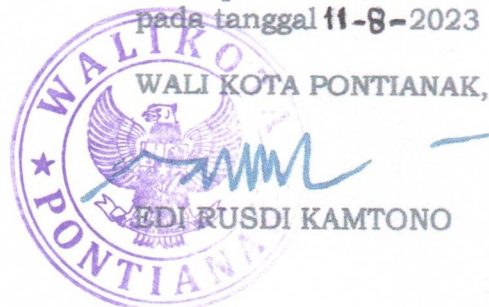
- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022;
 - c. BAB III : TUJUAN;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11-8-2023



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11-8-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

PENJABARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
3. Dinas Pekerjaab Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial Kota Pontianak;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
13. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
19. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
23. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
25. Inspektorat Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
28. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
30. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
31. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; dan
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;



BAB V
PENUTUP

Pada prinsipnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penyusunan RENJA-PD juga berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Penyusunan RENJA-PD juga dilakukan dengan tahapan dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang berlaku yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, Visi dan Misi Walikota Pontianak, RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan, DPA SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Rencana tindak lanjut dari rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 ini juga adalah sebagai bahan penyusunan dan penetapan Rencana Operasional pada rencana Tahun Anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pontianak, Agustus 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,



AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19680615 199803 1 009



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia Nya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Agustus 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-5
1.4	Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	II-1
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	II-12
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-14
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	III-2
3.3	Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	
BAB II	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Sampai dengan tahun 2023	II-4
BAB II	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	II-13
BAB II	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024	II-16
BAB II	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-25
BAB IV	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan untuk terlaksananya kualitas pelayanan publik yang baik.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RENJA Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), bagi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

- Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125).
 25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
 26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
 27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan unsur pendukung urusan pemerintahan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
 - 1.1.1. Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan, dengan target kinerja yaitu 71.74, capaian kinerja pada tahun 2022 tidak dapat diukur karena penghentian sementara pengisian PMPRB sehingga Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan tidak ada bisa dinilai.
 - 1.2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator :
 - 1.2.1. Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah , dengan target kinerja yaitu 71.74, capaian kinerja pada tahun 2022 tidak dapat diukur karena penghentian sementara pengisian PMPRB sehingga Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah tidak bisa dinilai.
 - 1.3. Program Perkonomian dan Pembangunan dengan indikator :
 - 1.3.1. Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa, dengan target kinerja yaitu 100%, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 96,75%

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan :

- a. Penilaian Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022 yang dilaksanakan tahun 2023 dihentikan sementara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB) dan mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan. Dan setiap instansi pemerintah diharapkan menyampaikan informasi praktik baik pelaksanaan birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders melalui link bit.ly/PraktikBaikRB2023.

- b. Adanya refocusing anggaran, sehingga terdapat tender/seleksi yang dibatalkan proses tendernya. Dan akibat adanya pengurangan anggaran tersebut, beberapa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui tender/seleksi tidak dapat dilaksanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator :

2.1.1. Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, dengan target kinerja yaitu 100%, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 88,80%, capaian tersebut termasuk kedalam kategori sangat berhasil karena masuk dalam interval IKM 81,26%-100%

2.1.2. Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan, dengan target kinerja yaitu 100%, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 99.36%, capaian tersebut termasuk kedalam kategori sangat berhasil karena masuk dalam interval IKM 81,26%-100%.

2.2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator :

2.2.1. Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi, dengan target kinerja yaitu 100%, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%, capaian tersebut termasuk kedalam kategori sangat berhasil.

2.2.2. Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK), dengan target kinerja yaitu 100%, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 100%, capaian tersebut termasuk kedalam kategori sangat berhasil

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target dikarenakan :

a. Organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi, pelaksanaannya telah sesuai dengan target dan pendanaan yang di tetapkan.

b. Perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK), pelaksanaannya telah sesuai dengan target waktu dan pendanaan yang di tetapkan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3.1. Program Perkonomian dan Pembangunan dengan indikator :

3.1.1. Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu 108.23%, capaian tersebut termasuk kedalam kategori sangat berhasil.

Faktor-faktor penyebab melebihi target dikarenakan :

- a. Kebijakan Extra Effort didalam upaya pengendalian inflasi Kota Pontianak serta Kebijakan Percepatan Peningkatan Literasi dan Inklusi.
- b. Adanya normalisasi kebijakan menuju Pemulihan Ekonomi Daerah Kota Pontianak sebagai upaya antisipasi gejolak krisis ekonomi.
- c. Terdapat analisis evaluasi berkala terhadap masing-masing BUMD setiap bulannya, triwulan dan tahunan sebagai hasil monitoring Pembina dan sebagai bahan Evaluasi kebijakan Wali Kota sebagai KPM BUMD.

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak pada tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Kerja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai tahun 2023 seperti tertera pada Tabel II.1 sebagai berikut

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %							
		Nilai IKM Sekretariat Daerah	98,7 Nilai							
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12,2 Nilai							
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %							
4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	15 Dokumen							
4 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen							
4 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen							
4 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	30 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	426 Orang/Bulan							
4 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen							
4 01 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	36 Dokumen							
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
4 01 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen							
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
4 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	3 Paket							
4 01 01 2.05 0003	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen							
4 01 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen							
4 01 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen							
4 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang							
4 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang							
4 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %							
4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen							
4 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan							
4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan							
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit							
4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129 Unit							
4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit							
4 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit							
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan							
4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan							
4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan							
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit							
4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit							
4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit							
4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit							
4 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit							
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %							
4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang/Bulan							
4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket							
4 01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang/Bulan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01 2.12		Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 %						
4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket							
4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	30 Paket							
4 01 01 2.13		Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi	100 %						
			Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	100 %						
4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15 Dokumen							
4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan							
4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen							
4 01 01 2.13 0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen							
4 01 01 2.13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Dokumen							
4 01 01 2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah	100 %						
			Persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	100 %						
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan							
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunika Pimpinan	9 Laporan							
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100 %						
			Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	100 %						
4 01 02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100 %						
4 01 02	2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	6 Dokumen						
4 01 02	2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen						
4 01 02	2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen						
4 01 02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	100 %						
4 01 02	2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30 Dokumen						
4 01 02	2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen						
4 01 02	2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	18 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 02 2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyusunan produk hukum daerah	100 %						
4 01 02 2.03 01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2340 Dokumen						
4 01 02 2.03 02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus						
4 01 02 2.03 03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	170 Dokumen						
4 01 02 2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100 %						
4 01 02 2.04 01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen						
4 01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	100 %						
			Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan	93,03 %						
			Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	95 %						
4 01 03 2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)	100 %						
			Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan)	100 %						
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100 %						
4 01 03 2.01 01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen						
4 01 03 2.01 02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan						
4 01 03 2.01 03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen						
4 01 03 2.01 04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100 %							
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24 Dokumen							
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan							
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24 Laporan							
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100 %							
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang/ dan Jasa	240 Dokumen							
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	135 Dokumen							
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan dan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa	1050 Orang							
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100 %							
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen							
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen							
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 Dokumen							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak tidak terlepas dari capaian Indikator Sasaran, Program yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan adalah indikator yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Capaian yang diperoleh dalam IKK adalah nilai keseluruhan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak seperti pada Tabel II.2 sebagai berikut.

Tabel II. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	-	95%	95%	-	-	-	-	
2	Nilai IKM Sekretariat Daerah	-	-	-	-	98.5	98.6	-	-	-	-	
3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	-	-	-	-	12	12.1	-	-	-	-	
4	Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	
5	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan Kesra	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	
6	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	
7	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan Pembangunan	-	-	-	-	97.10%	98.06%	-	-	-	-	
8	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	-	-	-	-	93%	94%	100%	-	-	-	
9	Persentase jumlah total proyek kontruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada	-	√	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
10	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-	√	-	-	-	-	0,43%	-	2%	2,5%	
11	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (metode tender)	-	√	-	-	-	-	60,89%	-	61,05%	62%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi selama periode 2020-2023 terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Belum tersedianya SDM yang memiliki kemampuan tentang perpetaan.
2. Ketidaksiuaian deadline/batas termin yang diberikan oleh pusat dengan realisasi program Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal sehingga sulit mencapai target 100%
3. Belum terakomodirnya Aspirasi masyarakat terhadap permohonan bantuan operasional kepada petugas posyandu, fardhu kifayah, guru ngaji, guru MDT.
4. Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyajikan data evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Keterlambatan penerbitan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum
6. Kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan.
7. Tidak adanya tempat pengkoordinasian terhadap kegiatan yang ada di Bagian Pemerintahan di organisasi induk pada Pemerintah Pusat.
8. Proses perencanaan yang belum optimal
9. Pelaksanaan tender/seleksi maupun pengadaan langsung yang dilaksanakan dengan metode e-pengadaan langsung maupun e-purchasing yang tidak berjalan sesuai perencanaan
10. Gangguan Sistem Informasi pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut di atas, serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak meliputi:

1. Pengendalian Inflasi Daerah
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan Penilaian SAKIP
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
5. Peningkatan Kerjasama Daerah dan Wilayah
6. Meningkatnya Pemerintahan yang taat hukum
7. Terinformasikannya Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sesuai ketentuan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Review Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak terhadap rancangan akhir RKPD dapat dilihat pada Tabel II.3 sebagai berikut.

Tabel II. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	39.718.577.395	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95%	39.718.577.395	
			Nilai IKM Sekretariat Daerah	98.5				Nilai IKM Sekretariat Daerah	98.5		
			Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12				Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	12		
01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	122.301.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	122.301.400	
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	23.385.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	23.385.800	
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	24.153.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	24.153.900	
01.01.04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Laporan	44.761.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Laporan	44.761.700	
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.355.783.005	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.355.783.005	
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 ASN	19.713.331.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 ASN	19.713.331.000	
01.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	1.610.656.705	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	1.610.656.705	
01.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	31.795.300	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	31.795.300	
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	22.176.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	22.176.500	
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.176.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.176.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	563.022.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	563.022.800	
01.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	244.580.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	244.580.000	
01.04.02	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.482.100	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.482.100	
01.04.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	18.611.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	18.611.600	
01.04.04	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	14.486.500	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	14.486.500	
01.04.05	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	162.000.000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang	162.000.000	
01.04.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	51.862.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	51.862.600	
01.04.07	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	7 Orang	42.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	7 Orang	42.000.000	
01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.262.198.357	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	4.262.198.357	
01.05.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	187.625.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	187.625.000	
01.05.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	224.578.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	224.578.800	
01.05.03	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	685.100.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	685.100.000	
01.05.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	293.620.350	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	293.620.350	
01.05.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	60.000.000	
01.05.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.074.781.207	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.074.781.207	
01.05.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	736.493.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	736.493.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	868.748.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	868.748.700	
01.06.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	311.413.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	311.413.000	
01.06.02	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 unit	37.615.300	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 unit	37.615.300	
01.06.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	372.192.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	372.192.100	
01.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.528.300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.528.300	
01.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.157.959.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.157.959.700	
01.07.01	Pennyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000	Pennyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000	
01.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.598.228.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.598.228.000	
01.07.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.034.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.034.500	
01.07.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	821.897.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	821.897.200	
01.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.682.561.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.682.561.850	
01.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	423.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	423.160.000	
01.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	389.890.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	389.890.000	
01.08.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	303.830.050	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	303.830.050	
01.08.04	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	720.737.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	720.737.000	
01.08.05	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	844.944.800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	844.944.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.09	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	758.210.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	758.210.000	
01.09.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	-	
01.09.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	42.960.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	42.960.000	
01.09.03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	715.250.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	715.250.000	
01.10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	2.010.829.850	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	2.010.829.850	
01.10.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.449.803.350	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.449.803.350	
01.10.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	361.026.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	361.026.500	
01.10.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	200.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	200.000.000	
01.11	Penataan Organisasi		Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	100%	1.786.657.525	Penataan Organisasi		Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	100%	1.786.657.525	
01.11.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokuemn	732.252.050	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokuemn	732.252.050	
01.11.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	578.601.600	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	578.601.600	
01.11.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	124.624.450	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	124.624.450	
01.11.04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	71.689.525	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	71.689.525	
01.11.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	279.489.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	279.489.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah	100%	2.128.127.708	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah	100%	2.128.127.708	
			persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	100%				persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	100%		
01.12.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	531.952.365	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	531.952.365	
01.12.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikas Pimpinan	3 Laporan	799.267.943	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikas Pimpinan	3 Laporan	799.267.943	
01.12.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	796.907.400	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	796.907.400	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100%	12.671.655.240	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan	100%	12.671.655.240	
			Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	100%				Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra	100%		
02.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%	2.029.053.200	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%	2.029.053.200	
02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	2 Dokumen	304.549.200	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	2 Dokumen	304.549.200	
02.01.02	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	268.306.300	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	268.306.300	
02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1.456.197.700	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1.456.197.700	
02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan masyarakatan	100%	9.096.517.900	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan masyarakatan	100%	9.096.517.900	
02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	6.442.013.300	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	6.442.013.300	
02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	679.248.200	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	679.248.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	1.975.256.400	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	1.975.256.400	
02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum daerah	100%	1.357.322.640	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum daerah	100%	1.357.322.640	
02.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	780 Dokumen	526.870.700	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	780 Dokumen	526.870.700	
02.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	536.078.400	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	536.078.400	
02.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	294.373.540	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Pontianak	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	294.373.540	
02.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	188.761.500	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100%	188.761.500	
02.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	188.761.500	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	188.761.500	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	100%	4.517.548.365	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	100%	4.517.548.365	
			Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	95,16%				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	95,16%		
			Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	91,72%				Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	91,72%		
03.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)	100%	1.138.449.800	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)	100%	1.138.449.800	
			Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan)	100%				Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan)	100%		
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100%				Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100%		
03.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	556.276.100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	556.276.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	295.750.300	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	295.750.300	
03.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	213.454.800	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	213.454.800	
03.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	72.968.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	72.968.600	
03.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100%	1.210.933.875	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	100%	1.210.933.875	
03.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	670.869.550	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	670.869.550	
03.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	209.207.625	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	209.207.625	
03.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	330.856.700	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	330.856.700	
03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	1.997.303.240	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	100%	1.997.303.240	
03.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa Barang dan Jasa	80 Dokumen	292.685.800	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa Barang dan Jasa	80 Dokumen	292.685.800	
03.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	391.243.100	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	391.243.100	
03.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	1.313.374.340	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	1.313.374.340	
03.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	100%	170.861.450	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	100%	170.861.450	
03.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	66.102.150	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	66.102.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	52.305.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	52.305.400	
03.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	52.453.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	52.453.900	
TOTAL					56.907.781.000	TOTAL					56.907.781.000

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2024 terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel II.4 sebagai berikut

Tabel II. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat/Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Posyandu Kelurahan Sungai Jawi Luar	Jumlah posyandu yang difasilitasi	Rp.5.000.000/ tahun	Berkaitan dengan bantuan operasional Posyandu, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai Tahun 2024 belum ada penambahan Pagu Anggaran sehingga beberapa usulan Posyandu belum dapat diberikan bantuan operasional
2	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat/Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Posyandu Kelurahan Sungai Jawi Dalam	Jumlah posyandu yang difasilitasi	Rp.5.000.000/ tahun	Berkaitan dengan bantuan operasional Posyandu, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai Tahun 2024 belum ada penambahan Pagu Anggaran sehingga beberapa usulan Posyandu belum dapat diberikan bantuan operasional
3	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat/Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Sungai Beliang	Jumlah posyandu yang difasilitasi	Rp.5.000.000/ tahun	Berkaitan dengan bantuan operasional Posyandu, Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai Tahun 2024 belum ada penambahan Pagu Anggaran sehingga beberapa usulan Posyandu belum dapat diberikan bantuan operasional
4	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat/Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Madrasah Diniyah Taklimiyah "Miftahul Ulum" Jl. PGA Gg. Kemuning Jalur 2 RW.19/RT.8	Jumlah guru madrasah yang difasilitasi	5 Guru	Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat telah memberikan bantuan transportasi kepada Guru MDT "Miftahul Ulum" Jl. PGA Gg. Kemuning pada tahun 2022 atas nama Siti Zubaidah. Tahun 2023 juga akan kita berikan bantuan kepada yang bersangkutan . Sampai saat ini Pemerintah Kota Pontianak baru dapat memfasilitasi guru MDT "Miftahul Ulum" sebanyak 1 (satu) orang
5	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Fasilitasi dan koordinasi hukum/Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kelurahan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	Untuk tahun 2023, kegiatan kadarkum dilaksanakan di kecamatan, peserta berjumlah 90 orang, dibagi 5 kelurahan, di kecamatan Pontianak kota ada 5 kelurahan sehingga peserta sekitar 18 orang, pada tahun 2023 akan diadakan lomba kadarkum tingkat kecamatan sedangkan pada tahun 2024 tidak dilaksanakan kegiatan kadarkum mengingat tahun 2024 akan dilakukan lomba kadarkum tingkat kota
6	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat/pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat/Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Wilayah Kelurahan Saigon, Kota Pontianak	Jumlah Peserta	-	Bimbingan Teknis bagi Petugas Fardhu Kifayah setiap tahun telah dilaksanakan, namun dibatasi 1 keluarahan 1 petugas Fardhu Kifayah
7	Program penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan/Pengadaan mebel	Kelurahan Siantan Tengah	Jumlah Mebel	-	Tidak ada anggaran hibah barang ke masyarakat pada kegiatan Sekretariat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung dan memperkuat pencapaian arah kebijakan nasional khususnya pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian melalui salah satu Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, antara lain dengan komitmen bersama dalam upaya pengendalian inflasi baik secara skala nasional maupun daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan dalam penentuan kebijakan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk menjaga pencapaian sasaran inflasi pada kisaran $\pm 3\%$ (yoy) di Tahun 2024.

Kedepan, pencapaian inflasi nasional dan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan ditengah peningkatan permintaan domestik. Potensi meningkatnya harga pangan harus dimitigasi dengan terus melakukan peningkatan produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan jalur logistik terkendali agar kelancaran distribusi tetap terjaga. Untuk itu, dengan memperhatikan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif), maka dalam mengimplemetasikan program kerja Tahun 2024 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak tetap berpedoman pada Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 -2024.

Disamping itu, dalam pencapaian Tujuan 8 (delapan) pembangunan berkelanjutan dari 17 (tujuh belas) SDGs menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki posisi yang penting untuk mendukung pencapaian SDGs. Peningkatan akses keuangan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didaerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak.

Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kota Pontianak dalam percepatan akses keuangan tetap berpedoman pada Peta Jalan (Road Map) Tim Pengendalian Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2021-2025. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan program kerja yang berfokus pada dukungan potensi unggulan daerah, TPKAD Kota Pontianak juga menselaraskan program kerjanya dengan program tematik Tahun 2024 yakni Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sekretariat Daerah mengemban tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Adapun tujuan strategis 2024-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun. Sasaran adalah merupakan Penjabaran dari Tujuan yang bersifat spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024-2026 melalui indikator sasaran sebagai berikut:

A. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Nilai IKM Sekretariat Daerah.

- (a) Kegiatan Penataan Organisasi
Indikator : Persentase capaian penataan organisasi
- (b) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
*Indikator :- persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah
- persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah*
- (c) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Indikator :persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi
- (d) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Indikator :persentase penyusunan produk hukum daerah

B. Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian

Indikator : Indeks Perekonomian

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator : Persentase implementasi kebijakan Perekonomian.

- (a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
*Indikator : - Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP)
- Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan)
- Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian*
- (b) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Indikator : Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam

C. Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan

Indikator : Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator : Persentase implementasi kebijakan Perekonomian.

- (a) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Indikator : Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan

D. Meningkatkan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

Indikator : Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Indikator : Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP.

(a) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa

Indikator : Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)

E. Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator : Nilai AKIP Kota Pontianak

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak

(a) Kegiatan Penataan Organisasi

Indikator : Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik

F. Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator : Nilai LPPD Kota Pontianak

Dicapai melalui program sebagai berikut, yaitu:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator : Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan

(a) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Indikator : Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)

(b) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Indikator : Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Pontianak akan menampung usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah merupakan pedoman Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan untuk tahun 2024 terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan, Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 23.385.800,-
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 30.000.000,-
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 24.153.900,-
- 1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 44.761.700,-

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 19.713.331.000,-
- 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 1.610.656.705,-
- 1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran Rp. 31.795.300,-

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran Rp. 22.176.500,-

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran Rp. 244.580.000,-
- 1.4.2. Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 29.482.100,-
- 1.4.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 18.611.600,-
- 1.4.4. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran Rp. 14.486.500,-
- 1.4.5. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran Rp. 162.000.000,-
- 1.4.6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 51.862.600,-
- 1.4.7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 42.000.000,-

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 187.625.000,-
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 224.578.800,-
- 1.5.3. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan anggaran Rp. 685.100.000,-
- 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 293.620.350,-
- 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 60.000.000,-
- 1.5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran Rp. 2.074.781.207,-
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 736.493.000,-

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 311.413.000,-
- 1.6.2. Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp. 37.615.300,-
- 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 372.192.100,-
- 1.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 147.528.300,-

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 13.800.000,-

- 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 1.598.228.000
- 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 724.034.500,-
- 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 821.897.200,-

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 423.160.000,-
- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 389.890.000,-
- 1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 303.830.050,-
- 1.8.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 720.737.000,-
- 1.8.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 844.944.800,-

1.9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1.9.1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH, dengan anggaran Rp. 42.960.000,-
- 1.9.2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp. 715.250.000,-

1.10. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- 1.10.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan anggaran Rp. 1.449.803.350,-
- 1.10.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran Rp. 361.026.500,-
- 1.10.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan anggaran Rp. 200.000.000,-

1.11. Penataan Organisasi

- 1.11.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan anggaran Rp. 732.252.050,-
- 1.11.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran Rp. 578.601.600,-
- 1.11.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan anggaran Rp. 124.624.450,-
- 1.11.4. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran Rp. 71.689.525,-
- 1.11.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp. 279.489.900,-

1.12. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- 1.12.1. Fasilitasi Keprotokolan, dengan anggaran Rp. 531.952.365,-
- 1.12.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran Rp. 799.267.943,-
- 1.12.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan anggaran Rp. 796.907.400,-

2. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

2.1. Administrasi Tata Pemerintahan

- 2.1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan anggaran Rp. 304.549.200,-
- 2.1.2. Pengelolaan administrasi kewilayahan, dengan anggaran Rp. 268.306.300,-
- 2.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan anggaran Rp. 1.456.197.700,-

2.2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- 2.2.1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, dengan anggaran Rp. 6.442.013.300,-
- 2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp. 679.248.200,-
- 2.2.3. Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 1.975.256.400,-

2.3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- 2.3.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, dengan anggaran Rp. 526.870.700,-
- 2.3.2. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan anggaran Rp. 536.078.400,-
- 2.3.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan anggaran Rp. 294.373.540,-

2.4. Fasilitasi Kerjasama Daerah

- 2.4.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan anggaran Rp. 181.761.500,-

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- 3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp. 556.276.100,-
- 3.1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan anggaran Rp. 295.750.300,-
- 3.1.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil, dengan anggaran Rp. 213.454.800,-
- 3.1.4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD, dengan anggaran Rp. 72.968.600,-

3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- 3.2.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan anggaran Rp. 670.869.550,-
- 3.2.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan anggaran Rp. 209.207.625,-
- 3.2.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan anggaran Rp. 330.856.700,-

3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- 3.3.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp. 292.685.800,-
- 3.3.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan anggaran Rp. 391.243.100,-
- 3.3.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran Rp. 1.313.374.340,-

3.4. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

- 3.4.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran Rp. 66.102.150,-
- 3.4.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 52.305.400,-
- 3.4.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, dengan anggaran Rp. 52.453.900,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024 dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 56.907.781.000,-. terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara rinci Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel IV. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Pontianak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01		SEKRETARIAT DAERAH															
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
4 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	5 Dokumen	100 Persen	23.385.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	23.385.800
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	30.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	24.153.900	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	24.153.900
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	10 Laporan	100 Persen	44.761.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10 Laporan	44.761.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.355.758.500				20.538.887.739			
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98,5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	142 Orang/Bulan	100 Persen	19.713.331.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/Bulan	18.924.659.000
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98,5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	1.610.632.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.582.433.439
4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98,5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	31.795.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	31.795.300
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					22.171.600				22.176.500			
4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98,5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	22.171.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.176.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											562.970.900			413.022.800
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	1 Paket	100 Persen	244.580.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	244.580.000
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	29.458.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	29.482.100
4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	4 Dokumen	100 Persen	18.604.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	18.611.600
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	14.476.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	14.486.500
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	27 Orang	100 Persen	162.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	12.000.000
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	100 Orang	100 Persen	51.851.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	51.862.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	7 Orang	100 Persen	42.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	42.000.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							4.246.145.917				4.262.152.023	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	187.534.900	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	187.625.000
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	224.378.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	224.578.800
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	685.100.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	685.100.000
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	292.525.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	293.620.350
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	90.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	2.060.272.317	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.074.734.873
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	706.335.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	736.493.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						868.089.100				868.748.700		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	1 unit	100 Persen	311.413.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	311.413.000
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	43 unit	100 Persen	37.461.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 unit	37.615.300
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	15 unit	100 Persen	371.652.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	372.192.100
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Unit	100 Persen	147.562.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	147.528.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.174.289.300				3.157.959.700				
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	13.800.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.800.000
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	1.598.580.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.598.228.000
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	724.022.100	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	724.034.500
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Laporan	100 Persen	837.887.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	821.897.200
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.707.255.150				2.682.561.850				
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 unit	100 Persen	423.160.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	423.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 unit	100 Persen	389.890.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	389.890.000
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	50 unit	100 Persen	303.823.350	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	303.830.050
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Unit	100 Persen	720.737.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	720.737.000
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	1 Unit	100 Persen	869.644.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	844.944.800
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							758.210.000				938.210.000	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	0	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Paket	100 Persen	42.960.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	42.960.000
4	01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Orang/Bulan	100 Persen	715.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	715.250.000
4	01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1.986.892.450					3.044.149.850
4	01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	1.425.933.350	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.449.803.350
4	01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	12 Paket	100 Persen	360.996.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1.244.346.500
4	01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	6 Paket	100 Persen	199.962.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi											1.786.657.525			1.486.657.525
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Capaian Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	5 Dokumen	100 Persen 100 Persen	732.252.050	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokuemn	632.252.050
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Capaian Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	4 Laporan	100 Persen 100 Persen	578.601.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	478.601.600
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	124.624.450	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	124.624.450
4	01	01	2.13	0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Capaian Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	71.689.525	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	71.689.525
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penataan Organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	2 Dokumen	100 Persen 100 Persen	279.489.900	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	179.489.900
4	01	01	2.14	Protokol dan Komunikasi Pimpinan											2.128.127.708			2.128.127.708
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	4 Laporan	100 Persen 100 Persen	531.952.365	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	531.952.365

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	3 Laporan	100 Persen 100 Persen	799.267.943	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komonikasi Pimpinan	3 Laporan	799.267.943
4	01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nilai IKM Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tingkat Kepuasan Bidang terhadap	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	Kota Pontianak	98.5 Nilai 95 Persen 12 Nilai	4 Laporan	100 Persen 100 Persen	796.907.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	796.907.400
4	01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								12.671.655.240				12.336.604.840
4	01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan								2.029.053.200				1.894.053.200
4	01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	304.549.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	2 Dokumen	304.549.200
4	01 02 2.01 0002	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	268.306.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	200.306.300
4	01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.456.197.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	1.389.197.700
4	01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								9.096.517.900				8.996.517.900
4	01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Persentase Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat yang difasilitasi	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	6.442.013.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	10 Dokumen	6.342.013.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat yang difasilitasi	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	679.248.200	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	679.248.200
4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat yang difasilitasi	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	1.975.256.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	1.975.256.400
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								1.357.322.640					1.257.272.240
4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	780 Dokumen	100 Persen	526.870.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	780 Dokumen	492.869.300
4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	5 Kasus	100 Persen	536.078.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	484.303.400
4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	50 Dokumen	100 Persen	294.373.540	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	280.099.540

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	02	2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah					188.761.500				188.761.500				
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra Persentase implementasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Presentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Pontianak	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	188.761.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	188.761.500
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.517.548.365				4.117.548.365					
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					1.138.449.800				1.138.449.800				
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) ; Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) ; Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	556.276.100	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	629.244.700
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) ; Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) ; Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	4 Laporan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	295.750.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	295.750.300
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) ; Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) ; Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	2 Dokumen	101 Persen 100 Persen 100 Persen	213.454.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	213.454.800
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) ; Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) ; Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	1 Dokumen	102 Persen 100 Persen 100 Persen	72.968.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	0 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						1.210.933.875			1.010.933.875				
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	8 Dokumen	100 Persen	670.869.550	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen	577.175.350
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	1 Laporan	100 Persen	209.207.625	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	164.516.025
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	8 Laporan	100 Persen	330.856.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	269.242.500
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.997.303.240			1.897.303.240				
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	80 Dokumen	100 Persen	292.685.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaa Barang dan Jasa	80 Dokumen	292.685.800
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	45 Dokumen	100 Persen	391.243.100	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen	291.243.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase implementasi kebijakan Perkeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	350 Orang	100 Persen	1.313.374.340	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang	1.313.374.340
4	01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam							170.861.450					70.861.450
4	01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase implementasi kebijakan Perkeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	1 Dokumen	100%	66.102.150	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	26.102.150
4	01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase implementasi kebijakan Perkeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	1 Dokumen	100%	52.305.400	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	22.305.400
4	01 03 2.04 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase implementasi kebijakan Perkeonomian Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pontianak	100 Persen 97,10 Persen 93,00 Persen	1 Dokumen	100%	52.453.900	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	22.453.900

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar bagian/unit kerja agar tercapai efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu perlu kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan suatu program kegiatan.

Pontianak, Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK
Dr. H. MULYADI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640421 198903 1 013



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Jl. Rahadi Oesman No.3 – Telp. (0561) 732570,733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111
Website : www.pontianak.go.id Email/Akun : sekda@pontianakkota.go.id

